

**PENGARUH DANA PERIMBANGAN DALAM MENGURANGI
KETIMPANGAN PENDAPATAN DI INDONESIA**

(Skripsi)

Oleh

DINA MARSELLA

2111031042



**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

**PENGARUH DANA PERIMBANGAN DALAM MENGURANGI
KETIMPANGAN PENDAPATAN DI INDONESIA**

Oleh

DINA MARSELLA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA AKUNTANSI**

Pada

**Jurusank Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas lampung**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

PENGARUH DANA PERIMBANGAN DALAM MENGURANGI KETIMPANGAN PENDAPATAN DI INDONESIA

Oleh
DINA MARSELLA

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umu (DAU), Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik), Dana Bantuan Operasional Kesehatan (DBOK), dan Dana Bantuan Operasional Pendidikan (DBOP) dalam mengurangi ketimpangan pendapatan di 34 provinsi di Indonesia selama periode 2020–2024. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif, metode dalam penelitian menggunakan metode analisis regresi data panel dengan model *Random Effect Model* (REM) yang terpilih sebagai model terbaik berdasarkan uji *Hausman* dan uji *Lagrange Multiplier* (LM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAU dan DBH berpengaruh negatif dan signifikan dalam menurunkan ketimpangan pendapatan, sedangkan DBOP berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Temuan ini menunjukkan pentingnya optimalisasi penggunaan dana perimbangan sebagai instrumen utama pemerintah dalam mendorong pembangunan dan menurunkan ketimpangan pendapatan di Indonesia.

Kata Kunci: Dana Perimbangan, Ketimpangan Pendapatan, Desentralisasi Fiskal, Federalisme Fiskal, Data Panel

ABSTRACT

THE EFFECT OF BALANCING FUNDS IN REDUCING INCOME INEQUALITY IN INDONESIA

By

DINA MARSELLA

This study aims to analyze the effect of Revenue Sharing Funds (DBH), General Allocation Funds (DAU), Physical Special Allocation Funds (DAK Fisik), Health Operational Assistance Funds (DBOK), and Education Operational Assistance Funds (DBOP) in reducing income inequality in 34 provinces in Indonesia during the period 2020-2024. The approach used is quantitative, with the research method employing panel data regression analysis using the Random Effect Model (REM), which was selected as the best model based on the Hausman test and the Lagrange Multiplier (LM) test. The results show that DAU and DBH have a negative and significant effect in reducing income inequality, while DBOP has a positive and significant effect on income inequality. These findings highlight the importance of optimizing the use of fiscal equalization funds as the government's primary instrument in promoting development and reducing income inequality in Indonesia.

Keywords: Fiscal Equalization Funds, Income Inequality, Fiscal Decentralization, Fiscal Federalism, Panel Data

Judul Skripsi

: **PENGARUH DANA PERIMBANGAN
DALAM MENGURANGI KETIMPANGAN
PENDAPATAN DI INDONESIA**

Nama Mahasiswa

: **Dina Marsella**

Nomor Pokok Mahasiswa

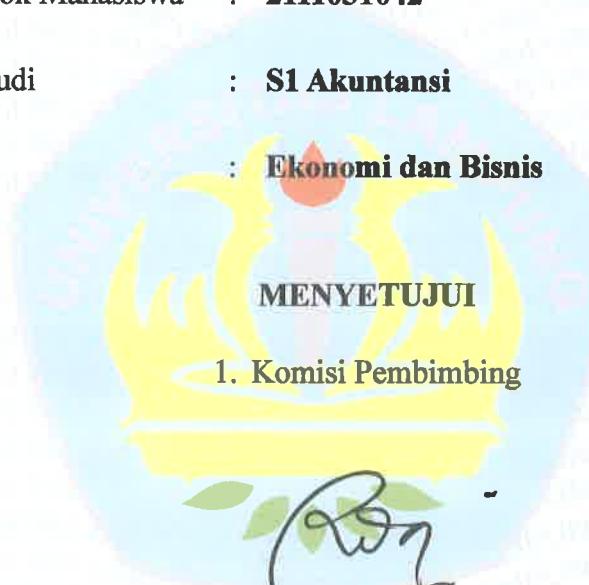
: **2111031042**

Program Studi

: **S1 Akuntansi**

Fakultas

: **Ekonomi dan Bisnis**


MENYETUJUI

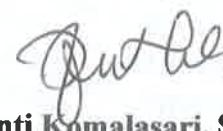
1. Komisi Pembimbing



Prof. Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si., Akt.
NIP. 19750620200012 2001

MENGETAHUI

2. Ketua Jurusan Akuntansi



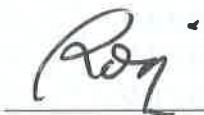
Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt., CA., CMA.
NIP. 19700801 199512 2001

MENGESAHKAN

1. Tim Pengaji

Ketua

: Prof. Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si., Akt.



Pengaji Utama

: Dr. Fajar Gustiawaty Dewi, S.E., M.Si., Akt.



Pengaji Kedua

: Rialdi Azhar, S.E., M.S.A., Ak., CA., CRP.



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.

NIP. 19660621 199003 1003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 3 November 2025

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dina Marsella

NPM : 2111031042

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Pengaruh Dana Perimbangan Dalam Mengurangi Ketimpangan Penadpatan Di Indonesia” adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian penulisan, pemikiran, dan pendapat Penulis lain yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya tanpa memberikan pengakuan Penulis aslinya. Apabila ditemukan dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bandar Lampung, 2 Desember 2025

Penulis



Dina Marsella

NPM 2111031042

RIWAYAT HIDUP



penulis yang bernama lengkap Dina Marsella, dilahirkan di Jakarta pada tanggal 27 Mei 2003. Penulis merupakan anak pertama dari lima bersaudara yang dilahirkan dari pasangan Bapak Jamhuri dan Ibu Samnina.

Penulis mengawali Pendidikan di TK Tunas Harapan pada tahun 2008. Kemudian, penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar (SD) di MIN 09 Jakarta dan tamat pada tahun 2015. Selanjutnya pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di MTs Negeri 13 Jakarta dan tamat pada tahun 2018. Lalu, melanjutkan Pendidikan Sekolah Kejuruan (SMK) di SMK Negeri 18 Jakarta dan tamat pada tahun 2021.

Pada tahun 2021, penulis diterima dan terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN. Kemudian, pada tahun 2024 penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Negeri Jemanten, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur. Selama menempuh pendidikan di Universitas Lampung, penulis aktif mengikuti berbagai kegiatan organisasi salah satunya organisasi Himpunan Mahasiswa Akuntansi (HIMAKTA) FEB Unila sebagai anggota bidang pengembangan aktivitas dan kreativitas mahasiswa. Penulis juga menjadi anggota UKM Kelompok Studi Pasar Modal (KSPM) FEB Unila. Selain kegiatan organisasi, pada semester 5 penulis juga mengikuti Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) Batch 5 di Sekertariat Direktorat Jenderal Diktiristek.

MOTTO

“Allah SWT tidak membebani seseorang melaikan sesuai dengan
kesanggupannya”

Q.S. Al-Baqrah: 286

“Allah tidak menjanjikan hidupmu akan selalu mudah. Tetapi allah berjanji,
bahwa sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”

Q.S. Al-Insyirah: 5-6

“Boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh
jadi kamu menyenangi sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui,
sedangkan kamu tidak mengetahui”

Q.S. Al-Baqarah: 216

“Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar, tetapi keberhasilan adalah milik
mereka yang senantiasa berusaha”

(B.J. Habibie)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmarnirahim

*Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad
Alhamdulillahirabbil'alamin*

Segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan segala rahmat dan karunia-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Dengan segala rasa syukur, kupersembahkan karya ini sebagai tanda cinta dan kasih kepada:

Kedua Orang Tuaku tercinta, Ayahanda Jamhuri dan Ibunda Samnina

Terima kasih atas seluruh cinta, kasih sayang, motivasi, dan kesabaran yang tak terhingga yang senantiasa mengiringi setiap langkahku. Suatu anugerah terindah bagiku memiliki orang tua yang sederhana, yang meski tak pernah merasakan bangku perkuliahan, tetapi kalian mampu membimbing, mendukung dan mendoakanku hingga aku dapat mencapai gelar sarjana ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan keberkahan, kesehatan, kebahagiaan, dan selalu melindungi kalian di dunia maupun akhirat, Aamiin ya rabbal 'aalamiin.

Adik-adikku tersayang, Sascia Giana, Dzaky Muhammad Abdillah,

Muhammad Zaid, dan Muhammad Dzulfahmi Ramadhan

Untuk adik-adikku terima kasih atas kehadiran kalian yang menjadi penyemangatku untuk selalu melangkah dan menjadi lebih baik. Sascia, terima kasih atas segala pengertiannya, terima kasih telah menjadi tempat ternyaman untuk berbagi cerita dan bertukar pikiran. Semoga Allah SWT selalu memberikan keberkahan dan kebahagiaan untuk kalian, Aamiin ya rabbal 'aalamiin.

Almamaterku tercinta, Universitas Lampung

SANCAWACANA

Bismillahirrahmarnirahim, segala puji dan Syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Dana Perimbangan dalam Mengurangi Ketimpangan Pendapatan di Indonesia” yang disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Fakultas ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam proses penyusunan skripsi ini telah mendapatkan banyak bimbingan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dalam kesempatan ini, dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, penulis secara khusus menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt., CA., CMA. selaku Ketua Jurusan S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Prof. Dr. Rindu Rika Gamayuni. S.E., M.Si., Akt. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, saran, dukungan, doa, serta kesabaran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Fajar Gustiawaty Dewi, S.E., M.Si., Akt. selaku dosen pembahas utama yang senantiasa memberikan bimbingan, kritik, dan saran dalam penulisan skripsi ini.

5. Bapak Rialdi Azhar, S.E., M.S.A., Ak., CA., CRP. selaku dosen pembahas kedua yang senantiasa memberikan bimbingan, kritik, dan saran dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Sari Indah Oktanti Sembiring, S.E., M.S.Ak. selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan arahan, saran dan nasihat kepada penulis selama menjadi mahasiswa.
7. Seluruh Dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan wawasan yang sangat berharga, serta membantu penulis baik selama proses perkuliahan maupun semasa penyusunan skripsi ini.
8. Pintu surgaku, Samnina. Perempuan cantik, yang paling hebat dan paling tangguh dalam hidupku. Mamaku sayang, terima kasih telah bertaruh nyawa untuk melahirkanku ke dunia ini, membeskarkanku dengan penuh kesabaran dan segenap kasih sayang, menjadi tempat ternyaman untukku pulang, meyankinkanku dikala aku ragu dengan diri sendiri. Mama, darimu aku belajar bagaimana hidup, menjadi perempuan kuat, bertanggung jawab, selalu berjuang, dan mandiri. Terima kasih telah menjadi ibu yang terbaik untukku, semoga Allah SWT selalu melimpahi umur yang panjang, keberkahan, kebahagiaan, kesehatan, dan perlindungan-NYA supaya mama bisa terus disisiku, mendoakanku dan mendukung setiap langkahku untuk mencapai kesuksesan, aamiin.
9. Ayahku tercinta, Jamhuri. Terima kasih atas segala doa, perhatian, serta perjuanganmu. Terima kasih telah menjadi sosok ayah yang selalu peduli kepada putrinya, ayah yang selalu siap menemani ke mana pun aku pergi, ayah yang tidak pernah lelah mengusahakan apapun untuk kebahagiaan keluarganya, meskipun aku tahu setiap langkahmu pasti tidaklah mudah. Terima kasih telah mengingatkan dan mengajarkanku akan keimanan yang sangat berharga dalam hidup. Ayah, semoga Allah memberikan umur yang panjang, rezeki, kesehatan, serta keberkahan untuk ayah dapat menemani langkahku menggapai impian, aamiin.
10. Adik-adikku tersayang, Sascia Giana, Dzaky Muhammad Abdillah, Muhammad Zaid, dan Muhammad Dzulfahmi Ramadhan, terima kasih telah

hadir dan melengkapi kebahagiaan dalam hidup penulis. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan doa untuk penulis, sehingga penulis dapat terus semangat untuk mencapai Impian dan menjadi kakak yang memberikan pengaruh positif untuk kalian.

11. Bapak Mukhlis dan Ibu Sakdiach, selaku paman dan tante penulis yang telah menggantikan peran Ayah dan Ibu selama penulis menjalani perkuliahan di Lampung. Terima kasih telah sepenuh hati memberikan kasih sayang, perhatian, dan dukungan yang sangat berarti, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini dengan baik.
12. Sahabat seperjuanganku “Kelompok ALK Materi 13”, Zahra, Nabilah, Nadia, Nafilah. Terima kasih atas kehadiran kalian yang selalu menemani, berbagi canda tawa dan air mata, selalu bersedia membuka pintu kost kapan pun aku datang. Terima kasih telah mewarnai dan meninggalkan kenangan berharga dari awal perkuliahan hingga penulis menyelesaikan skripsi ini.
13. Teruntuk Elza Andriyani, sahabat penulis yang selalu menemani dan menjadi tempat bercerita dari penulis SMK hingga saat ini. Terima kasih karena tidak pernah meninggalkan penulis sendirian, selalu memberikan doa dan dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik. Semoga persahabatan ini terus terjalin dan dipenuhi canda tawa.
14. Keluarga besar Ayah dan Ibu, terima kasih atas segala perhatian, doa, dan dukungan untuk menyelesaikan tugas akhir skripsi.
15. Seluruh teman-teman Akuntansi 2021 dan KKN Desa Negeri Jemanten, terima kasih telah mengisi masa perkuliahanmu dengan berbagi ilmu, pengalaman, dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
16. Rekan Infra MSIB 5, terima kasih atas ilmu baru, pengalaman, dan motivasi dalam perjalanan akademik, sehingga penulis memiliki semangat baru untuk menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
17. Terakhir, penulis ingin menyampaikan terima kasih dan rasa bangga yang sangat mendalam kepada diri sendiri, Dina Marsella. Terima kasih telah bertahan hingga sejauh ini, ketika keraguan datang silih berganti, dan ketika langkah terasa sangat berat untuk di teruskan. Aku bangga padamu, bukan karena kau sempurna, tapi karena kau tetap ikhlas dan terus melangkah walau

terkadang harapanmu tidak sesuai dengan apa yang semesta berikan. Jangan pernah lelah untuk terus berusaha dan bersyukur atas apapun yang ada dalam dirimu. Terima kasih karena sudah berani memilih, memilih untuk mencoba, memilih untuk belajar, dan memilih untuk menyelesaikan apa yang telah kamu mulai. Semoga Allah selalu menuntun setiap langkah kecilmu, dikelilingi oleh orang-orang baik, dan satu persatu mimpimu akan tercapai.

Bandar Lampung, 5 Desember 2025

Penulis

Dina Marsella

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
2.1 Landasan Teori	9
2.1.1 Teori Federalisme Fiskal (<i>Fiscal Federalism</i>)	9
2.2 Dana Perimbangan.....	10
2.2.1 Dana Bagi Hasil	10
2.2.2 Dana Alokasi Umum	12
2.2.3 Dana Alokasi Khusus Fisik	13
2.2.4 Dana Bantuan Operasional Kesehatan	15
2.2.5 Dana Bantuan Operasional Pendidikan.....	15
2.3 Ketimpangan Pendapatan	16
2.4 Penelitian Terdahulu	18
2.5 Kerangka Konseptual	20
2.6 Pengembangan Hipotesis.....	21
2.6.1 Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Ketimpangan Pendapatan.....	21
2.6.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Ketimpangan Pendapatan	22
2.6.3 Pengaruh Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) Terhadap Ketimpangan Pendapatan	23

2.6.4 Pengaruh Dana Bantuan Operasional Kesehatan (DBOK) Terhadap Ketimpangan Pendapatan.....	24
2.6.5 Pengaruh Dana Bantuan Operasional Pendidikan (DBOP) Terhadap Ketimpangan Pendapatan.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	27
3.1 Jenis dan Sumber Data.....	27
3.2 Populasi dan Sampel	27
3.2.1 Populasi Penelitian.....	27
3.2.2 Sampel Penelitian.....	27
3.3 Definisi Operasional Variabel	29
3.4 Teknik Analisis Data	32
3.4.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	32
3.4.2 Metode Estimasi Data Panel	33
3.4.3 Pemilihan Model Regresi Data Panel.....	34
3.4.4 Uji Asumsi Klasik	36
3.4.3 Analisis Regresi Data Panel	37
3.5 Pengujian Hipotesis	38
3.5.1 Uji T-statistik	38
3.5.2 Uji Koefisien Determinasi (<i>R</i> 2).....	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	40
4.1 Analisis Statistik Deskriptif	40
4.2 Estimasi Model Regresi Data Panel.....	45
4.2.1 Common Effect Model (CEM).....	46
4.2.2 Fixed Effect Model (FEM).....	47
4.2.3 Random Effect Model (REM).....	49
4.3 Pemilihan Model Regresi Data Panel	50
4.3.1 Uji Chow	50
4.3.2 Uji Hausman.....	51
4.3.3 Uji Lagrange Multiplier (LM).....	52
4.4 Analisis Regresi Data Panel	54
4.5 Uji Hipotesis	56
4.5.1 Uji Parsial (Uji t).....	56

4.5.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2)	57
4.6 Pembahasan.....	58
4.6.1 Pengaruh Dana Bagi Hasil Dalam Mengurangi Ketimpangan Pendapatan	58
4.6.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum Dalam Mengurangi Ketimpangan Pendapatan	
60	
4.6.3 Pengaruh Dana Alokasi Khusus Fisik Dalam Mengurangi Ketimpangan Pendapatan	61
4.6.4 Pengaruh Dana Bantuan Operasional Kesehatan Dalam Mengurangi Ketimpangan Pendapatan.....	62
4.6.5 Pengaruh Dana Bantuan Operasional Pendidikan Dalam Mengurangi Ketimpangan Pendapatan.....	63
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	65
5.1 Kesimpulan	65
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	66
5.3 Saran	67
5.4 Implikasi Kebijakan.....	67
Daftar Pustaka.....	69
LAMPIRAN.....	74

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Kategori Indeks Gini	18
Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu.....	18
Tabel 3. 1 Sample Penelitian.....	28
Tabel 3. 2 Definisi Variabel Operasional	29
Tabel 4. 1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif	40
Tabel 4. 2 Output Estimasi CEM	46
Tabel 4. 3 Output Estimasi FEM.....	47
Tabel 4. 4 Output Estimasi REM	49
Tabel 4. 5 Uji Chow	51
Tabel 4. 6 Uji Hausman.....	52
Tabel 4. 7 Uji LM.....	52
Tabel 4. 8 Hasil Analisis Regresi Data Panel	54
Tabel 4. 9 Hasil Uji t	56
Tabel 4. 10 Hasil Uji Koefisien Determinasi	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Indeks Gini Provinsi di Indonesia (2021-2023)	1
Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir	20

BAB I

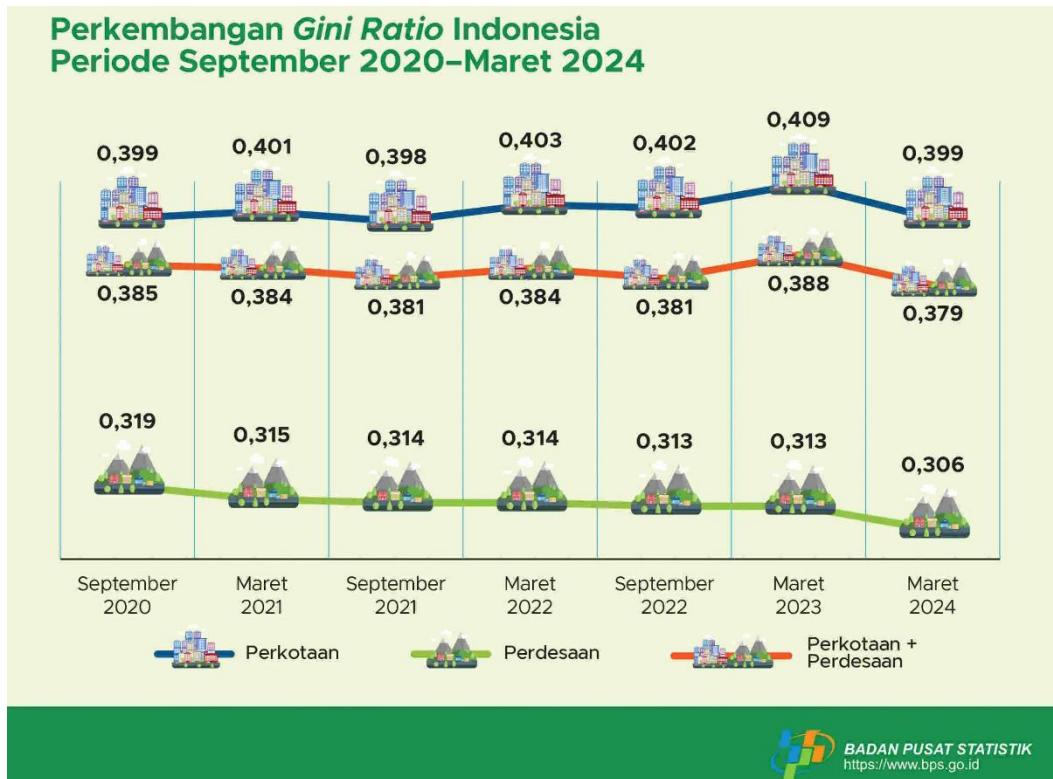
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketimpangan pendapatan masih menjadi salah satu permasalahan berkelanjutan yang ada pada setiap negara, termasuk di Indonesia. Permasalahan ini juga berkaitan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Nomor 10 yang salah satu tujuannya ialah mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi, yang ada di dalam negara maupun antar negara. Dalam konteks Indonesia, ketimpangan pendapatan masih menunjukkan bahwa pencapaian SDGs Nomor 10 masih memerlukan strategi yang lebih efektif dalam distribusi sumber daya ekonomi. Meskipun pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan desentralisasi fiskal melalui alokasi dana perimbangan yang bertujuan untuk membantu daerah dalam membiayai pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mengurangi ketimpangan sumber pendanaan yang ada pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

World Bank menegaskan bahwa kemiskinan masih menjadi permasalahan negara berkembang yang sulit diselesaikan. Di Indonesia hampir seluruh daerah menjadikan kemiskinan sebagai permasalahan utama dalam pembangunan ekonomi. Upaya mengatasi kemiskinan ini tidak dapat dilakukan secara terpisah dari kondisi ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan masalah kompleks lainnya yang berkaitan dengan kemiskinan (Salsabila dkk., 2022).

Gambar 1.1 Perkembangan Rasio Gini di Indonesia Periode September 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, rasio gini nasional pada maret 2024 tercatat menurun menjadi sebesar 0,379 dari sebelumnya 0,388 pada Maret 2023. Namun, angka tersebut masih masuk dalam kategori ketimpangan sedang dan mencerminkan distribusi pendapatan yang berjalan relatif lambat. Ketimpangan pada daerah perkotaan cenderung lebih tinggi dari daerah perdesaan. Tercatat pada bulan Maret 2024 daerah perkotaan memiliki indeks rasio gini sebesar 0,399, sedangkan daerah perdesaan memiliki indeks rasio gini lebih rendah di angka 0,306. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat pada daerah perkotaan lebih berpeluang mengalami kesenjangan ekonomi, sementara masyarakat daerah perdesaan relatif memiliki distribusi yang lebih merata.

Ketimpangan distribusi pendapatan yang terjadi pada masyarakat berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi dan menciptakan ketidakstabilan sosial, yang akhirnya dapat memperburuk kondisi ekonomi negara (Bakar & Rahmawan,

2021). Jika tidak segera diatasi, kesenjangan juga dapat memperburuk akses masyarakat terutama masyarakat miskin terhadap layanan dasar seperti kesehatan dan Pendidikan, sehingga meningkatkan risiko kemiskinan jangka panjang (Rahma, 2024).

Melalui teori federalisme fiskal (*fiscal federalism*), yang menekankan pentingnya peran pemerintah untuk meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya, pemerataan distribusi, serta stabilitas ekonomi antar daerah. Menurut Musgrave & Musgrave (1984) dan Oates (1972) dalam teori federalisme fiskal, pemerintah pusat dinilai lebih efektif untuk menjalankan fungsi dari stabilitas ekonomi dan distribusi pendapatan, sedangkan pemerintah daerah diarahkan untuk melaksanakan fungsi alokasi sumber daya melalui desentralisasi. Penerapan kebijakan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia didasarkan atas UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah. Peraturan ini mengatur bahwa Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN dan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan fiskal, meningkatkan kemampuan keuangan antar daerah, serta meningkatkan penyediaan layanan publik yang lebih berkualitas.

Alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) bertujuan untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pemerintah pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi sumber daya yang dimiliki oleh daerah penghasil. Pembagian DBH dilakukan dengan *prinsip by origin*, sementara penyaluran DBH berdasarkan *based on actual revenue* atau penyaluran DBH berdasarkan realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan.

Dana alokasi umum (DAU) ialah dana yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah, dana ini bersifat “*block grant*” yaitu pemerintah daerah memiliki kebebasan dalam penggunaan DAU sesuai dengan kebutuhan daerah. Besaran DAU ditetapkan dengan minimal 26% dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN)

Neto. Dana Alokasi Umum suatu daerah ditentukan dari besar atau kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*) daerah tersebut, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (*fiscal need*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*) Yuliantoni & Indra Arza (2021). Daerah yang memiliki kapasitas fiskal yang tinggi dan kebutuhan fiskal yang rendah maka akan mendapatkan Dana Alokasi Umum (DAU) dalam jumlah yang rendah. Sebaliknya daerah yang memiliki kapasitas fiskal yang rendah dan kebutuhan kapasitas yang tinggi maka akan memperoleh DAU dalam jumlah yang lebih besar (Muda & Ridha, 2018).

Selain itu, Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) merupakan salah satu bagian dari dana khusus yang bersifat earmarked grant, artinya penggunaannya ditentukan untuk menadainai kegiatan tertentu seperti pembangunan jalan, irigasi, trnsportasi, dan pembangunan infrastruktur lainnya yang menjadi prioritas nasional. Todaro & Smith (2006) menjelaskan bahwa ketersediaan infrastruktur di suatu wilayah merupakan faktor penting yang menentukan derajat kecepatan serta perluasan pembangunan ekonomi. Seiring berlanjutnya pertumbuhan, pembangunan infrasturktur juga akan mengalami pemerataan dan akan diikuti pemerataan pendapatan sehingga ketimpangan akan berkurang.

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki peran krusial dalam perakonomian suatu negara. Peningkatan investasi dalam Pendidikan dan kesehatan merupakan bentuk investasi produktif yang dapat meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan produktivitas individu, sehingga berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengurangan ketimpangan (Arbianti & Suchaina, 2025). Pendidikan berperan penting dalam membekali masyarakat dengan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja. Sementara itu, kesehatan yang baik memungkinkan individu untuk bekerja secara produktif dan optimal, sehingga mampu memperoleh pendapatan yang lebih tinggi (Kaloko dkk., 2025).

Pemerintah Indonesia menyadari pentingnya kedua aspek tersebut melalui kebijakan Dana Alokasi Khusus Nonfisik dalam bentuk Dana Bantuan Operasional Kesehatan (DBOK) dan Dana Bantuan Operasional Pendidikan

(DBOP). Dana ini dialokasikan untuk meningkatkan akses serta kualitas pelayanan dasar di bidang kesehatan dan Pendidikan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Melalui DBOK, pemerintah berupaya memperluas layanan kesehatan dasar, menekan angka kematian ibu dan anak, serta prevalensi stunting yang berdampak jangka panjang terhadap produktivitas masnusia. Sementara itu, DBOP diarahkan untuk mendukung pemerataan kesempatan Pendidikan, membiayai operasional sekolah, pemeliharaan sarana dan prasarana, dan meningkatkan kualitas Pendidikan dengan pengembangan kompetensi pendidik.

Penelitian yang dilakukan oleh Azizi (2018) menunjukkan bahwa DBH berpengaruh negatif dan signifikan. Temuan ini juga dibuktikan oleh Purba & Simandjorang (2024) bahwa DBH berpengaruh negatif dan signifikan pada Pemerintah di Sumatera Utara yang dapat merancang dan mengelola DBH dengan baik sehingga mampu untuk menurunkan ketimpangan pendapatan. Semakin tinggi DBH pada suatu daerah maka tingkat ketimpangan pendapatan daerah akan menurun. Namun berbeda dalam penelitian Ridho & Wijayanti (2022) bahwa Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap terhadap penurunan ketimpangan pendapatan.

Menurut Ridho & Wijayanti (2022) Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Jika jumlah DAU ditingkatkan maka ketimpangan pendapatan di Indonesia akan semakin berkurang. Besaran belanja pegawai pada pemerintah daerah yang bersumber dari DAU perlu untuk dikurangi dan dialihkan untuk belanja modal supaya perekonomian daerah mampu tumbuh dan berkembang. Sedangkan Azizi (2018) dan Purba & Simandjorang (2024) menemukan bahwa DAU memiliki hubungan positif signifikan terhadap indeks gini.

Penelitian yang dilakukan oleh Ridho & Wijayanti (2022) dan Purba & Simandjorang (2024) ditemukan bahwa alokasi DAK Fisik tidak signifikan dalam menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan yang ada pada pemerintah daerah di Sumatera Utara. Hal ini terjadi karena kurangnya dukungan dari pemerintah Indonesia serta pemerintah daerah di Sumatera Utara. Hasil penelitian tersebut

juga diperkuat oleh Qomariyah & Priyarsono (2016) yang menyatakan bahwa DAK Fisik dan DAK Nonfisik belum dapat menurunkan ketimpangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Purba & Simandjorong (2024) pada pemerintah daerah di Sumatera Utara menunjukkan bahwa Dana Bantuan Operasional Kesehatan (DBOK) dapat dikelola dengan baik secara efisien dan tepat sasaran, sehingga realisasi pengeluaran pemerintah pada sektor Kesehatan dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Hasil tersebut juga diperkuat oleh Furceri dkk. (2021) menyatakan bahwa dengan belanja pemerintah dalam sektor Kesehatan dapat membantu menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan saat pandemi Covid-19.

Penelitian yang dilakukan oleh Purba & Simandjorong (2024) menunjukkan bahwa Dana Bantuan Operasional Pendidikan (DBOP) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penurunan ketimpangan di Sumatera Utara. situasi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum dapat mengelola dengan baik, penggunaan DBOP lebih difokuskan pada pengeluaran operasional, dan kurangnya upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas dan jumlah tenaga pendidik yang ada pada daerah tersebut. Hasil ini sejalan dengan penelitian oleh Wirandana & Khoirunurrofik (2022) mengatakan bahwa pengelolaan DBOP belum dapat mengurangi ketimpangan pendapatan. Sehingga, DBOP dapat mencapai hasil yang baik dan mencegah ketimpangan. Penelitian Arshed dkk. (2019) menunjukkan bahwa DBOP berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan.

Berdasarkan hasil dari penelitian sebelumnya yang masih menunjukkan hasil tidak konsisten sehingga terdapat *research gap* serta kurangnya efektifitas dana perimbangan yang masih perlu dikaji lebih lanjut, dan terbatasnya referensi mengenai fungsi Dana Bantuan Alokasi Kesehatan dan Dana Bantuan Alokasi Pendidikan. Dengan demikian, penelitian ini dianggap menarik serta relevan untuk diteliti kembali. Nilai keterbaruan dalam penelitian ini terdapat pada objek yang digunakan, yaitu pemerintah provinsi yang ada di Indonesia dalam periode waktu tahun 2020-2024. Berdasarkan uraian tersebut, penulis ingin untuk meneliti

kembali topik dengan judul **“Pengaruh Dana Perimbangan Dalam Mengurangi Ketimpangan Pendapatan di Indonesia”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang terjadinya masalah tersebut, maka dirumuskan beberapa rumusan masalah:

1. Apakah Dana Bagi Hasil dapat menurangi ketimpangan pendapatan?
2. Apakah Dana Alokasi Umum dapat mengurangi ketimpangan pendapatan?
3. Apakah Dana Alokasi Khusus Fisik dapat mengurangi ketimpangan pendapatan?
4. Apakah Dana Bantuan Operasional Kesehatan dapat mengurangi ketimpangan pendapatan?
5. Apakah Dana Bantuan Operasional Pendidikan dapat mengurangi ketimpangan pendapatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang terjadi, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap ketimpangan pendapatan.
2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap ketimpangan pendapatan.
3. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK fisik) terhadap ketimpangan pendapatan.
4. Untuk mengetahui pengaruh Dana Bantuan Operasional Kesehatan (DBOK) terhadap ketimpangan pendapatan.
5. Untuk mengetahui pengaruh Dana Bantuan Operasional Pendidikan (DBOP) terhadap ketimpangan pendapatan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang keuangan publik dan daerah

2. Manfaat Praktis

a. Bagi akademisi

Penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya terkait keuangan daerah amupun kebijakan fiskal. Hasil penelitian ini juga dapat memberikan gambaran empiris mengenai pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Bantuan Operasional Kesehatan, dan Dana Bantuan Operasional Pendidikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia.

b. Bagi Pemerintah

Bagi Pemerintah, diharapkan hasil dari penelitian yang dilakukan ini dapat memberikan masukkan bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan fiskal agar lebih tepat sasaran, sehingga distribusi dana tidak hanya meningkatkan kapasitas fiskal daerah tetapi juga mampu menurunkan ketimpangan antarwilayah.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Federalisme Fiskal (*Fiscal Federalism*)

Suatu pendekatan dalam studi keuangan publik yang memahami hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ialah dengan teori federalisme fiskal, menurut Musgrave (1984) dan Oates (1972) teori ini menekankan pentingnya *revenue and expenditure assignment* antar tingkat pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah daerah yang berada lebih dekat dengan masyarakat dibandingkan pemerintah pusat, diharapkan dapat lebih mengetahui kondisi serta kebutuhan masyarakat sehingga dengan kewenangan yang diberikan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Konsep federalisme fiskal menjadi pedoman penting bagi pemerintah dalam menyusun rancangan kebijakan keuangan, baik di tingkat nasional maupun daerah (subnasional). Federalisme fiskal diterapkan oleh suatu negara yang berusaha mengaplikasikan desentralisasi fiskal dalam pemerintahannya (Kenyon, 2018).

Menurut Amalia & Haryanto (2019) teori federalisme fiskal merupakan teori yang menjelaskan hubungan antara desentralisasi dengan aspek ekonomi, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat. Teori ini menggambarkan bagaimana pemerintah pusat merancang berbagai alokasi anggaran yang akan diberikan kepada pemerintah daerah dengan tujuan menambah pendapatan pemerintah daerah sehingga dapat direalisasikan melalui berbagai program

kebijakan pelayanan kepada masyarakat yang pada akhirnya dapat mensejahterakan dan mengurangi angka kemiskinan.

Dalam berbagai literatur mengenai federalisme fiskal, terdapat dua pendekatan teoritis yang digunakan untuk menganalisis dampak desentralisasi terhadap perekonomian, yaitu *traditional theories (first generation theories)* dan *new perspective theories (second generation theories)*. Teori federalisme fiskal juga menyatakan bahwa pemerintah pusat bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas ekonomi makro dan melakukan redistribusi pendapatan sebagai bantuan bagi masyarakat miskin. Fungsi stabilitas makro, yaitu memelihara perekonomian tetap berada pada penyerapan tenaga kerja yang tinggi dan menjaga stabilitas harga. Sedangkan redistribusi pendapatan, yaitu menciptakan distribusi pendapatan yang adil dengan menciptakan pajak progresif (Sihombing dkk., 2024).

2.2 Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan pendapatan daerah yang dialokasikan oleh pemerintah pusat untuk mendanai seluruh kegiatan daerah yang bertujuan untuk menciptakan otonomi daerah agar suatu daerah tidak merasakan kesenjangan (Periansya dkk., 2021). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang telah direvisi menjadi UU Nomor 1 Tahun 2022. tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dana perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) Dana ini bertujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal yang ada di berbagai daerah, sehingga setiap daerah memiliki kemampuan yang memadai untuk melaksanakan pembangunan dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

2.2.1 Dana Bagi Hasil

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa dana bagi hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan untuk daerah berdasarkan persentase tertentu untuk mendanai berbagai kebutuhan daerah sebagai upaya pelaksanaan desentralisasi. Alokasi Dana Bagi Hasil bertujuan untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pemerintah pusat dan

daerah dengan memperhatikan potensi sumber daya yang dimiliki oleh daerah penghasil.

Pembagian DBH dilakukan dengan *prinsip by origin*, sementara penyaluran DBH berdasarkan *based on actual revenue* atau penyaluran DBH berdasarkan realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan. Dana Bagi Hasil (DBH) terdiri atas penerimaan negara dari pajak dan penerimaan negara bukan pajak (Sumber Daya Alam). Bagi Hasil Pajak terdiri dari:

1. Penerimaan Pph Pasal 21 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, dibagi denganimbang 80% untuk Pemerintahan; 8% untuk Provinsi yang bersangkutan; 12 % untuk Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang bersangkutan.
2. Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB), dibagi denganimbang 20% untuk Pemerintahan; 16% untuk Provinsi yang bersangkutan; 64% untuk Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
3. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dibagi denganimbang 10% untuk Pemerintahan; 16,2% untuk Provinsi yang bersangkutan; 64,8% untuk Kabupaten/Kota yang bersangkutan; 9% untuk biaya pemungutan.
4. Berdasarkan UU No 39 Tahun 2007 Cukai Hasil Tembakau, dibagi denganimbang 30% untuk Provinsi yang penghasil; 40% untuk Kabupaten/Kota penghasil; 30% Kabupaten/Kota Lainnya.

DBH Sumber Daya Alam terdiri dari:

1. Kehutanan berasal dari:
 - a. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH), dibagi denganimbang 20% untuk Pemerintah; 16% untuk Provinsi yang bersangkutan; 64% Kabupaten/Kota penghasil
 - b. Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH), dibagi denganimbang 20% untuk Pemerintah; 16% Provinsi yang bersangkutan; 32% untuk Kabupaten/Kota penghasil; 32% untuk Kabupaten/Kota lainnya.

- c. Dana Reboisasi dibagi dengan imbang 60% untuk Pemerintahan; 40% untuk Kabupaten/Kota penghasil.
- 2. Pertambangan Umum
 - a. Iuran Tetap (*Land-rent*), dibagi dengan imbang 20% untuk Pemerintah; 16% untuk Provinsi yang bersangkutan; 64% Kabupaten/Kota penghasil.
 - b. Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksplorasi (*Royalty*), dibagi dengan imbang 20% untuk Pemerintah; 16% Provinsi yang bersangkutan; 32% untuk Kabupaten/Kota penghasil; 32% untuk Kabupaten/Kota lainnya.
- 3. Perikanan dibagi dengan imbang 20% untuk pemerintahan dan 80% untuk Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- 4. Pertambangan Minyak Bumi dari wilayah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya dibagi dengan imbang 84,5% untuk Pemerintahan; 5,17% untuk Provinsi yang bersangkutan; 10,33% untuk Kabupaten/Kota lainnya dalam Provinsi yang bersangkutan.
- 5. Pertambangan Gas Bumi dari wilayah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya dibagi dengan imbang 69,5% untuk Pemerintahan; 6,1% untuk Provinsi yang bersangkutan; 24,4% untuk Kabupaten/Kota lainnya dalam Provinsi yang bersangkutan.
- 6. Pertambangan Panas Bumi dibagi dengan imbang 20% untuk Pemerintahan; 16% untuk Provinsi yang bersangkutan; 32% untuk Kabupaten/Kota penghasil; 32% untuk Kabupaten/Kota lainnya dalam Provinsi yang bersangkutan.

2.2.2 Dana Alokasi Umum

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa dana alokasi umum (DAU) ialah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dan untuk mendanai berbagai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Besaran DAU ditetapkan dengan minimal 26% dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) Neto.

Alokasi DAU bersifat “*block grant*” yaitu pemerintah daerah memiliki kebebasan dalam penggunaan DAU sesuai dengan kebutuhan daerah dengan

kewenangan desentralisasi dan otonomi daerah. Dana Alokasi Umum suatu daerah ditentukan dari besar atau kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*) daerah tersebut, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (*fiscal need*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*) (Yuliantoni & Indra Arza, 2021). Kebutuhan fiskal merupakan kebutuhan pembiayaan daerah untuk menyelenggarakan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, kapasitas fiskal menggambarkan kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan sendiri, terutama melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Daerah yang memiliki kapasitas fiskal yang tinggi dan kebutuhan fiskal yang rendah maka akan mendapatkan Dana Alokasi Umum (DAU) dalam jumlah yang rendah. Sebaliknya daerah yang memiliki kapasitas fiskal yang rendah dan kebutuhan kapasitas yang tinggi maka akan memperoleh DAU dalam jumlah yang lebih besar (Muda & Ridha, 2018). Perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Dana Alokasi Umum} = \text{Alokasi Dasar} + \text{Celah Fiskal}$$

Alokasi Dasar dihitung berdasarkan data jumlah Pegawai negeri Sipil Daerah (PNSD) dan besaran belanja gaji PNSD dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan lain terkait dengan penggajian. Cela Fiskal dirumuskan sebagai berikut:

$$CF = \text{Kebutuhan Fiskal (total belanja daerah rata-rata)} - \text{Kapasitas Fiskal (PAD + DBH)}$$

2.2.3 Dana Alokasi Khusus Fisik

Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) merupakan salah satu bagian dari Belanja Daerah yang dialokasikan dari APBN ke Daerah dan Desa dengan tujuan mendanai pelaksanaan urusan yang diberikan ke Daerah dan Desa. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 dijelaskan bahwa Dana Alokasi Fisik (DAK Fisik) merupakan dana yang dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu yang bertujuan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik daerah sebagai upaya untuk mencapai prioritas nasional, mempercepat pembangunan daerah dengan karakteristik tertentu dalam

rangka mengurangi kesenjangan layanan publik, dan/atau mendorong pertumbuhan perekonomian daerah otonom. Menurut fungsinya, Dana Alokasi Fisik dibedakan menjadi tiga dengan tujuan sebagai berikut:

1. DAK Fisik Reguler, bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan pelayanan dasar dan pemerataan ekonomi.
2. DAK fisik Penugasan, bertujuan untuk mendukung pencapaian prioritas nasional yang menjadi kewenangan daerah dengan lingkup kegiatan spesifik dan Lokasi prioritas tertentu.
3. DAK Fisik Afirmasi, bertujuan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar padalokasi prioritas yang termasuk kategori derah perbatasan, kepulauan, tertinggal dan transmigrasi.

Dalam penerapan kebijakan Dana Alokasi Khusus Fisik terdapat beberapa langkah-langkah yang harus terpenuhi. Pertama, penetapan Program dan Kegiatan, yaitu Rencana Kerja Pemerintah harus memuat program dan kegiatan yang akan didanai oleh DAK Fisik merupakan program yang menjadi prioritas nasional. Kegiatan dan program diusulkan oleh Kementerian Teknis yang melalui proses koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara dan Perencanaan Nasional.

Penetuan daerah penerima DAK Fisik harus memenuhi kriteria berikut:

1. Kriteria umum, ditetapkan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang terlihat dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah.
2. Kriteria khusus, ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah.
3. Kriteria Teknis, ditetapkan melalui indeks teknis oleh Menteri teknis terkait dan disusun berdasarkan indikator-indikator kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK.

2.2.4 Dana Bantuan Operasional Kesehatan

Kesehatan memiliki peran yang penting dalam menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Salah satu faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya derajat kesehatan adalah besaran alokasi pembiayaan di sektor kesehatan. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) merupakan bantuan dana dari pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan dengan tujuan untuk membantu pemerintah daerah melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk mempercepat *Millenium Development Goals (MDGs)* dengan meningkatkan kinerja puskesmas dan jaringannya serta Pos Kesehatan Desa (Poskedes) dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan (Septyantie & Cahyadin, 2013). Sumber daya masyarakat yang sehat akan berdampak pada peningkatan produktivitas dalam bekerja, oleh karena itu, kebijakan pemerintah yang mempriorotaskan belanja kesehatan dapat membantu mencapai tujuan pengurangan ketimpangan pendapatan (Rindiani dkk., 2025)

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2023 menyatakan bahwa sebagai upaya pemerataan akses dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk mewujudkan kesehatan masyarakat yang baik, diperlukan dukungan dana transfer ke daerah berupa bantuan operasional kesehatan melalui dana alokasi khusus non fisik. Dana Bantuan Alokasi Kesehatan terdiri atas DBOK Dinas Provinsi dan DBOK Puskesmas Kabupaten/Kota yang perhitungannya mempertimbangkan:

1. Jumlah penduduk
2. Luas wilayah kerja
3. Kondisi epidemiologi dan karakteristik daerah
4. Realisasi penyerapan anggaran dan kepatuhan penyampaian laporan

2.2.5 Dana Bantuan Operasional Pendidikan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 yang menyatakan bahwa Bantuan Operasional Pendidikan (BOSP) merupakan bagian dari DAK non Fisik yang bertujuan untuk mendukung biaya operasional non

personalia satuan pendidikan. Dalam pengelolaan Dana BOS harus berdasarkan Prinsip:

1. Flaksibel, dalam pengelolaan dana harus dialokasikan sesuai kebutuhan pada satuan Pendidikan dan berdasarkan komponen penggunaan dana.
2. Efektif, dalam pengelolaan dana diharapkan dapat memberikan hasil, pengaruh dan berdaya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di Satuan Pendidikan.
3. Efisien, dalam pengelolaan dana diupayakan dapat meningkatkan kualitas belajar Peserta Didik dengan dana yang minimal dan memiliki hasil yang optimal.
4. Akuntabel, dalam pengelolaan dana dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5. Transparan, dalam pengelolaan dana dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan.

Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOS) dibagi menjadi tiga (3) jenis, yaitu: Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD), dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (BOP Pendidikan Kesetaraan). Alokasi dihitung berdasarkan besaran satuan biaya masing-masing daerah dikalikan dengan jumlah peserta didik yang terdaftar di Dapodik.

2.3 Ketimpangan Pendapatan

Menurut Todaro & Smith (2006) ketimpangan pendapatan adalah ketidakmerataan distribusi pendapatan yang terjadi di masyarakat dalam suatu wilayah yang sama. Ketimpangan pendapatan juga dapat diartikan sebagai perbedaan tingkat kesejahteraan ekonomi antara masyarakat berpendapatan tinggi dan berpendapatan rendah yang terlihat dari pendapatan yang mereka peroleh. Selanjutnya, menurut Kuncoro (2010) ketimpangan pendapatan ini terjadi karena

adanya perbedaan sumber daya alam, kondisi geografis, dan faktor produksi yang ada pada masing-masing daerah.

Menurut Badan Pusat Statistik (2024) Gini Ratio atau sering disebut indeks gini merupakan parameter yang digunakan untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan. Formula yang digunakan untuk menghitung gini rasio adalah sebagai berikut:

$$GR = 1 - \sum_{i=0}^n f_i(Y_i + Y_{i-1})$$

Dimana:

GR = *Gini Ratio*

f_i = Jumlah persentase penduduk dalam tingkat pendapatan ke-*i*

Y_i = Jumlah persentase kumulatif penghasilan hingga kelas-*i*

Y_{i-1} = Jumlah persentase kumulatif penghasilan pada kelas sebelumnya (*i*-1)

Perhitungan rasio gini dilakukan dengan membagi penduduk ke dalam 10 kelompok penduduk (*decile*) mulai dari 10% penduduk pendapatan terendah hingga 10% penduduk berpendapatan tertinggi. Kemudian menentukan besarnya persentase pendapatan yang diterima oleh setiap kelompok, selanjutnya menjumlahkan pendapatan kelompok tersebut secara kumulatif. Nilai $f_i(Y_i + Y_{i-1})$ menggambarkan kontribusi relatif tiap kelompok pendapatan terhadap pemerataan distribusi pendapatan. Setelah seluruh nilai dijumlahkan, nilai tersebut akan dikurangi 1 untuk memperoleh nilai gini rasio (BPS, 2011).

Indeks Gini menghasilkan rentang nilai antara 0 dan 1, dimana nilai yang semakin rendah atau mendekati nol (0) menunjukkan distribusi pendapatan yang semakin merata pada wilayah tersebut. Namun sebaliknya, rentang nilai yang semakin besar atau mendekati satu (1) menunjukkan pendapatan yang tidak merata atau semakin tinggi ketimpangan pendapatan pada wilayah tersebut. Indeks gini yang berada dibawah 0,30 termasuk pada Tingkat Ketimpangan

Pendapatan (TKP) rendah, indeks 0,30 – 0,50 termasuk pada TKP sedang, dan indeks diatas 0,50 termasuk pada TKP tinggi (Andrianus & Said, 2006).

Tabel 2. 1 Kategori Indeks Gini

Nilai	Keterangan
<0.30	Tingkat Ketimpangan Rendah
0.30-0.50	Tingkat Ketimpangan Sedang
>0.50	Tingkat Ketimpangan Tinggi

Sumber: Andrianus & Said (2006)

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini berkaitan dengan beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan referensi, sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Purba & Simandjorang (2024)	Pengaruh Dana Perimbangan dalam Mengurangi Ketimpangan Pendapatan dan Mendorong Pertumbuhan Pendapatan di Sumatera Utara	DBH berpengaruh negatif dan signifikan, DBOK dan DAU berpengaruh positif signifikan terhadap penurunan ketimpangan pendapatan. Sedangkan DAK Fisik, dan DBOP tidak berpengaruh signifikan terhadap penurunan pendapatan di Sumatera Utara.
2.	Azizi (2018)	Dampak Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Ketimpangan Produk	Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan. Sedangkan Dana Alokasi Umum memiliki

		Domestik Regional Bruto di Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2005-2014	pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan di Provinsi Sulawesi Selatan.
3.	Ridho & Wijayanti (2022)	Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia Tahun 2015-2020	Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh yang terhadap penurunan ketimpangan pendapatan.
4.	Wirandana & Khoirunurrofik (2022)	Educational Inequality in Indonesia: Are Intergovernmental Fiscal Transfer Effective in Reducing the Gap?	Dana Alokasi Khusus memiliki hubungan positif dengan rasio gini pendidikan. Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap rasio gini Pendidikan.
5.	Maulina dkk. (2021)	Pengaruh PAD, Dana Perimbangan, Belanja Model, dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	DBH, DAU, dan DAK berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Hasil ini mengindikasikan pemerintah masih kurang dalam mengelola pendapatan.
6.	Qomariyah & Priyarsono (2016)	Dampak Transfer Fiskal dan Belanja Modal Pemerintah Daerah	DAK fisik maupun non fisik belum berpengaruh

		Terhadap Perekonomian Sektoral, Ketimpangan dan Kemiskinan di Indonesia	terhadap penurunan ketimpangan.
7.	Arshed dkk. (2019)	Education stock and its implication for income inequality: The case of Asian economies	DBOP berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan
8.	Rindiani dkk. (2025)	Peran pengeluaran pemerintah fungsi Pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial terhadap ketimpangan di Indonesia	Belanja pemerintah pada fungsi Pendidikan, kesehatan, dan sosial berpengaruh negative dan signifikan dalam menurunkan ketimpangan dalam jangka panjang maupun jangka pendek.

2.5 Kerangka Konseptual

Berikut merupakan kerangka konseptual dari penelitian ini:



Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir

2.6 Pengembangan Hipotesis

2.6.1 Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Ketimpangan Pendapatan

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa dana bagi hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan untuk daerah berdasarkan persentase tertentu untuk mendanai berbagai kebutuhan daerah sebagai upaya pelaksanaan desentralisasi fiskal. Alokasi Dana Bagi Hasil bertujuan untuk memperbaiki kesenjangan kemampuan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi sumber daya yang dimiliki oleh daerah tersebut. DBH tidak hanya diberikan kepada daerah penghasil, tetapi juga dibagi kepada daerah lain non-penghasil yang berada dalam satu wilayah provinsi, sehingga daerah dengan keterbatasan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetap memperoleh tambahan fiskal untuk membiayai pembangunan wilayahnya (Purwowidhu, 2023). Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui DBH memungkinkan pemerintah daerah memperbaiki dan memperluas kualitas layanan publik yang selanjutnya akan meningkatkan produktivitas serta membuka akses ekonomi masyarakat secara lebih merata. Dengan peningkatan pelayanan publik yang lebih merata maka masyarakat memiliki peluang usaha yang lebih luas dan dapat meningkatkan keterampilan yang pada akhirnya dapat mendorong pemerataan ekonomi masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Azizi (2018) menunjukkan bahwa DBH berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, artinya semakin tinggi DBH yang diterima suatu daerah, semakin rendah tingkat ketimpangan pendapatannya. Temuan ini juga dibuktikan oleh Purba & Simandjorang (2024) pada pemerintah daerah di Sumatera Utara yang dapat merancang dan mengelola DBH dengan baik sehingga mampu untuk menurunkan ketimpangan pendapatan. Oleh karena itu, hipotesis pertama yang dapat dirumuskan adalah:

H_1 = Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan

2.6.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Ketimpangan Pendapatan

Dana Alokasi Umum (DAU), sebagaimana diatur dalam UU No. 33 Tahun 2004, merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN dan dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Besaran DAU ditetapkan dengan minimal 26% dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) Neto dan bersifat “*block grant*” yaitu pemerintah daerah memiliki kebebasan dalam penggunaan DAU sesuai dengan kebutuhan daerah dengan kewenangan desentralisasi dan otonomi daerah.

Dana Alokasi Umum suatu daerah ditentukan dari besar atau kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*) daerah tersebut, yang merupakan selisih antara kebutuhan fiskal daerah (*fiscal need*) untuk menyediakan layanan publik dan kesejahteraan masyarakat, dengan kapasitas fiskal daerah (*fiscal capacity*) yang diukur dari kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan, terutama melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Yuliantoni & Indra Arza, 2021). Karena itu, daerah dengan kapasitas fiskal rendah dan kebutuhan fiskal tinggi akan memperoleh DAU lebih besar dibandingkan daerah yang kondisi fiskalnya lebih baik (Muda & Ridha, 2018).

Menurut Putri & Natha (2014) DAU menjadi instrumen penting untuk mendukung pelayanan publik dasar dan pembangunan ekonomi, jika jumlah DAU dipergunakan guna mendanai belanja pembangunan dibandingkan belanja rutin. Ketika DAU diarahkan pada belanja pembangunan seperti peningkatan infrastruktur produktif serta program pebguatan SDM, maka DAU mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, meningkatkan produktivitas masyarakat, dan memperluas kesempatan ekonomi bagi masyarakat berpendapatan rendah (Sari, 2025). Kondisi ini pada akhirnya membantu menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan antar masyarakat maupun antar wilayah (Ridho & Wijayanti, 2022). Oleh karena itu, hipotesis kedua yang dapat dirumuskan adalah:

H_2 = Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan

2.6.3 Pengaruh Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) Terhadap Ketimpangan Pendapatan

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 57 Tahun 2024 menjelaskan bahwa Dana Alokasi Fisik (DAK Fisik) merupakan dana yang dialokasikan dari APBN yang bertujuan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik daerah sebagai upaya untuk mencapai prioritas nasional, mempercepat pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik, dan/atau mendorong pertumbuhan perekonomian daerah otonom.

Menurut Chotia (2017) infrastruktur dapat berperan ganda. Apabila infrastruktur dibangun secara merata dapat meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan dasar dan peluang ekonomi yang lebih luas, sehingga berkontribusi pada pemerataan pendapatan. namun, apabila pembangunan infrastruktur hanya terkonsentrasi pada wilayah tertentu, maka kesenjangan ekonomi akan meningkat.

Penelitian Wahyuni dkk. (2021) menemukan bahwa DAK Fisik pada bidang jalan, bidang sanitasi, bidang perumahan dan pemukiman, bidang kelautan dan perikanan, bidang bidang pariwisata dan bidang pasar berkontribusi menurunkan tingkat kemiskinan yang pada akhirnya akan menurunkan ketimpangan pendapatan. Temuan ini diperkuat oleh penelitian Sari (2025) yang menyatakan bahwa peningkatan DAK Fisik yang diiringi peningkatan pembangunan infrastruktur di setiap daerah mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan mempersempit kesenjangan antar kelompok pendapatan. Oleh karena itu, hipotesis ketiga yang dapat dirumuskan adalah:

H_3 = Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan

2.6.4 Pengaruh Dana Bantuan Operasional Kesehatan (DBOK) Terhadap Ketimpangan Pendapatan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2022 menyatakan bahwa sebagai upaya pemerataan akses dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk mewujudkan kesehatan masyarakat yang baik, diperlukan dukungan dana transfer ke daerah berupa bantuan operasional kesehatan melalui dana alokasi khusus non fisik. Dana Bantuan Operasional Kesehatan (DBOK) merupakan Dana yang dialokasikan Untuk membantu mendanai kegiatan operasional di bidang kesehatan yang ada di daerah sesuai dengan program prioritas nasional bidang Kesehatan. Alokasi anggaran tersebut meliputi peningkatan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, dan pencegahan penyakit (Rindiani dkk., 2025) .

Kesehatan memiliki peranan yang penting, kondisi kesehatan dan gizi yang buruk khususnya pada ibu dan anak akan menciptakan generasi yang berkualitas buruk. Sedangkan generasi yang sehat dan bergizi baik akan menghasilkan otak yang cerdas dan sumber daya manusia yang berkualitas. Pada tingkat mikro yaitu individual dan keluarga, kesehatan merupakan dasar bagi produktivitas kerja dan kapasitas untuk belajar disekolah. Tenaga kerja yang sehat secara fisik dan mental akan lebih kuat dan produktif sehingga mendapatkan penghasilan yang tinggi. Sedangkan pada tingkat makro, penduduk dengan tingkat kesehatan yang baik merupakan masukan (input) penting untuk menurunkan kemiskinan, pertumbuhan penduduk, dan meratakan pendapatan serta ekonomi masyarakat (Septyantie & Cahyadin, 2013) .

Penelitian yang dilakukan oleh Purba & Simandjorang (2024) pada pemerintah daerah di Sumatera Utara menunjukkan bahwa Dana Bantuan Operasional Kesehatan (DBOK) dapat dikelola dengan baik secara efisien dan tepat sasaran, sehingga realisasi pengeluaran pemerintah pada sektor Kesehatan dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Hasil tersebut juga diperkuat oleh Furceri dkk. (2021) menyatakan bahwa belanja pemerintah dalam sektor kesehatan dapat membantu menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan saat

pandemi Covid-19. Oleh karena itu, hipotesis keempat yang dapat dirumuskan adalah:

H_4 = Dana Bantuan Operasional Kesehatan (DBOK) berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan

2.6.5 Pengaruh Dana Bantuan Operasional Pendidikan (DBOP) Terhadap Ketimpangan Pendapatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 yang menyatakan bahwa Bantuan Operasional Pendidikan (BOSP) merupakan bagian dari DAK non Fisik yang bertujuan untuk mendukung biaya operasional non personalia satuan pendidikan. Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOSP) dibagi menjadi tiga (3) jenis, yaitu: Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD), dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (BOP Pendidikan Kesetaraan).

Modal manusia sebagai investasi individu melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Investasi ini bertujuan meningkatkan produktivitas, baik secara individual maupun kolektif. Modal manusia memiliki karakteristik unik, yakni tidak dapat diperjualbelikan, bersifat jangka panjang, dan memberikan potensi keuntungan besar di masa depan. Pendidikan berperan signifikan dalam mendorong pembangunan ekonomi, karena individu berpendidikan tinggi memiliki peluang lebih besar untuk pekerjaan dan pendapatan yang lebih baik (Nurani & Solihin, 2025). Peningkatan tingkat Pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi penurunan ketimpangan pendapatan (P. Sari dkk., 2024). Semakin merata akses pendidikan dan semakin tinggi kualitas pembelajaran, maka semakin kecil peluang terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa individu dengan pendidikan lebih tinggi cenderung memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh pekerjaan yang layak, penghasilan yang lebih tinggi, serta mobilitas ekonomi yang lebih baik. Sebaliknya, individu yang berpendidikan rendah sering terjebak di sektor

informal dengan pendapatan yang rendah, pada akhirnya memperlebar ketimpangan pendapatan.

Penelitian yang dilakukan oleh Fadila & Idris (2025) menunjukkan bahwa Dana Bantuan Operasional Pendidikan (DBOP) berpengaruh signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Sumatera Barat. Kesadaran Masyarakat akan pentingnya Pendidikan, baik bagi kemajuan individu maupun negara, menjadi hal yang krusial. Dengan perubahan pola pikir Masyarakat, tujuan pembangunan nasional untuk menurunkan ketimpangan pendapatan dapat tercapai.

Oleh karena itu, hipotesis kelima yang dapat dirumuskan adalah:

H_5 = Dana Bantuan Operasional Pendidikan (DBOP) berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi data panel, yang merupakan gabungan dari data *time series tahun* 2020 sampai 2024, dan cross-sectional yang terdiri dari tiga puluh delapan (34) Provinsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari postur transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) direktorat jenderal keuangan (DJPK), kementerian keuangan, dan badan pusat statistik (BPS).

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi Penelitian

Populasi menurut Sekaran & Wiley (2003) mengacu pada seluruh kelompok, orang, peristiwa, atau hal-hal yang akan diteliti. Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah seluruh provinsi yang ada di Indonesia.

3.2.2 Sampel Penelitian

Menurut Sekaran & Wiley (2003) sampel merupakan subkelompok atau bagian dari populasi yang memiliki karakteristik atau kriteria tertentu. Dengan kata lain, tidak semua elemen populasi dapat menjadi sampel. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Kriteria pengambilan sample dalam penelitian ini adalah Provinsi yang memiliki indeks rasio gini terdaftar di BPS dalam periode 2020-2024.

Tabel 3. 1 Kriteria Sampel Penelitian

No.	Kriteria	Jumlah
1.	Provinsi di Indonesia	38
2.	Provinsi yang tidak memiliki data rasio gini lengkap selama periode 2020 – 2024	(4)
	Sample	34
	Tahun pengamatan (2020 – 2024)	5
	Total sample penelitian	170

Tabel 3. 2 Sampel Penelitian

No	Nama Provinsi	No	Nama Provinsi
1.	Aceh	18.	Kepulauan Riau
2.	Bali	19.	Lampung
3.	Banten	20.	Maluku
4.	Bengkulu	21.	Maluku Utara
5.	DI Yogyakarta	22.	Nusa Tenggara Barat
6.	DKI Jakarta	23.	Nusa Tenggara Timur
7.	Gorontalo	24.	Papua
8.	Jambi	25.	Papua Barat
9.	Jawa Barat	26.	Riau
10.	Jawa Tengah	27.	Sulawesi Barat
11.	Jawa Timur	28.	Sulawesi Selatan
12.	Kalimantan Barat	29.	Sulawesi Tengah
13.	Kalimantan Selatan	30.	Sulawesi Tenggara
14.	Kalimantan Tengah	31.	Sulawesi Utara
15.	Kalimantan Timur	32.	Sumatera Barat
16.	Kalimantan Utara	33.	Sumatera Selatan
17.	Kepulauan Bangka Belitung	34.	Sumatera Utara

Dengan waktu pengamatan selama tahun 2020-2024, sehingga didapatkan sebanyak 170 data sampel.

3.3 Definisi Operasional Variabel

Menurut Penelitian ini menggunakan variabel dependen dan variabel independen sebagai variabel penelitian. Menurut Kothari C.R. (2004) jika suatu variabel bergantung atau merupakan akibat dari variabel lainnya, maka variabel tersebut disebut sebagai variabel dependen. Ketimpangan pendapatan merupakan variabel dependen dalam penelitian ini. Sedangkan variabel independen menurut Kothari C.R. (2004) merupakan variabel yang mempengaruhi atau menyebabkan adanya variabel dependen. Dalam penelitian ini, variabel independen terdiri dari dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus fisik (DAK fisik), dana bantuan operasional kesehatan (DBOK), dana bantuan operasional pendidikan (DBOP).

Tabel 3. 2 Definisi Variabel Operasional

Variabel	Definisi	Indikator	Skala Ukur
Ketimpangan Pendapatan (Y)	Gini Ratio atau sering disebut indeks gini merupakan parameter yang digunakan untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan. Badan Pusat Statistik (2024)	$GR = 1 - \sum_{i=0}^n fp_i(f_{c_i} - f_{c_{i-1}})$ Badan Pusat Statistik (2024)	Rasio (0-1)
Dana Bagi Hasil (X1)	Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004, DBH adalah dana yang bersumber dari	DBH= Bagi Hasil Pajak + Bagi Hasil SDA (UU No. 33 tahun 2004)	Nominal

	pendapatan APBN, yang dialokasikan untuk daerah berdasarkan persentase tertentu untuk mendanai berbagai kebutuhan daerah sebagai upaya pelaksanaan desentralisasi.		
Dana Alokasi Umum (X2)	Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004, (DAU) ialah dana yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah dan untuk mendanai berbagai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.	DAU= Alokasi Dasar + Cela Fiskal CF= Kebutuhan Fiskal – Kapasitas Fiskal (UU No. 33 tahun 2004)	Nominal
Dana Alokasi Khusus Fisik (X3)	Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 57 Tahun 2024 dijelaskan bahwa Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK)	DAK Fisik= DAK Reguler + DAK Penugasan + DAK Afirmasi	Nominal

	Fisik) merupakan dana yang bertujuan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik Daerah sebagai upaya untuk mencapai prioritas nasional, mempercepat pembangunan Daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik, dan/atau mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah otonom.	(Perpres No. 57 Tahun 2024)	
Dana Alokasi Khusus Nonfisik Operasional Kesehatan (X4)	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 Dana Bantuan Operasional Kesehatan (DBOK) merupakan DAK Nonfisik bidang kesehatan dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan mendukung kegiatan	DBOK= BOK Dinas + BOK Puskesmas (PMK Nomor 204/PMK.07/2022)	Nominal

	operasional di bidang kesehatan yang ada di daerah sesuai dengan program prioritas nasional bidang Kesehatan.		
Dana Alokasi Khusus Nonfisik Operasional Pendidikan (X5)	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 yang menyatakan bahwa Bantuan Operasional Pendidikan (BOSP) merupakan bagian dari DAK non Fisik yang bertujuan untuk mendukung biaya operasional non personalia satuan pendidikan	Dana Bos + Dana BOP PAUD + Dana BOP Kesetaraan (PMK Nomor 204/PMK.07/2022)	Nominal

Sumber: <https://djpk.kemenkeu.go.id>

3.4 Teknik Analisis Data

3.4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Menurut Kothari C.R. (2004) analisis deskriptif merupakan penelitian yang berkaitan dengan prediksi spesifik, narasi fakta dan karakteristik individu, kelompok, atau situasi tertentu. Analisis deskriptif bertujuan untuk memperoleh informasi yang lengkap dan akurat dengan ketentuan yang cukup untuk perlindungan terhadap bias dan harus memaksimalkan keandalan sehingga bersifat kaku dan tidak fleksibel.

3.4.2 Metode Estimasi Data Panel

Menurut Gujarati & Porter (2015) regresi data panel adalah teknik regresi yang menggabungkan antara data *cross-sectional* dan data *time series* untuk menghasilkan estimasi yang lebih akurat dan efisien. Terdapat tiga model pendekatan yang dapat dilakukan untuk mengestimasi regresi data panel, yaitu *Common Effect Model (CEM)*, *Fixed Effect Model (FEM)*, dan *Random Effect Model (REM)*. Ketiga model ini penting untuk dilakukan karena masing-masing model memiliki pendekatan yang berbeda dalam menangkap variasi data antar individu, wilayah, maupun waktu.

3.4.2.1 *Common Effect Model (CEM)*

Common Effect Model adalah model yang paling sederhana untuk mengestimasi parameter model data panel, yaitu dengan mengkombinasikan data *time series* dan *cross section* sebagai satu kesatuan tanpa melihat adanya perbedaan waktu dan individu (entitas). Pendekatan yang dipakai adalah metode *Ordinary Least Square (OLS)* sebagai teknik estimasinya. *Common Effect Model* mengabaikan adanya perbedaan dimensi individu maupun waktu atau dengan kata lain perilaku data antar individu sama dalam berbagai kurun waktu.

3.4.2.2 *Fixed Effect Model (FEM)*

Fixed Effect Model adalah model yang menunjukkan walaupun intersep mungkin berbeda untuk setiap individu (entitas), tetapi intersep individu tersebut tidak bervariasi terhadap waktu (konstan). Jadi, *Fixed Effect Model* diasumsikan bahwa koefisien *slope* tidak bervariasi terhadap individu maupun waktu (konstan). Pendekatan yang dipakai adalah metode *Ordinary Least Square (OLS)* sebagai teknik estimasinya. Keunggulan yang dimiliki metode ini adalah dapat membedakan efek individu dan efek waktu serta metode ini tidak perlu menggunakan asumsi bahwa komponen error tidak berkorelasi dengan variabel bebas.

3.4.2.3 *Random Effect Model (REM)*

Random Effect Model merupakan metode yang akan mengestimasi data panel di mana variabel gangguan (residual) mungkin saling berhubungan antar

waktu dan antar individu (entitas). Model ini berasumsi bahwa *error term* akan selalu ada dan mungkin berkorelasi sepanjang *time series* dan *cross section*. Pendekatan yang dipakai adalah metode *Generalized Least Square* (GLS) sebagai teknik estimasinya. Metode ini lebih baik digunakan pada data panel apabila jumlah individu lebih besar daripada jumlah kurun waktu yang ada.

3.4.3 Pemilihan Model Regresi Data Panel

Pada dasarnya dalam menentukan model regresi data panel terdiri dari tiga pendekatan, yaitu *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM), maka selanjutnya diperlukan pemilihan model manakah yang paling tepat secara statistik untuk mengestimasi persaman regresi data panel. Terdapat tiga pengujian dalam menentukan model yang akan digunakan dalam regresi data panel, yaitu *Uji Chow*, *Uji Hausman*, dan *Uji Lagrange Multiplier* (LM).

3.4.3.1 Uji Chow

Uji chow adalah pengujian yang digunakan untuk memilih pendekatan terbaik antara model pendekatan *Common Effect Model* (CEM) dengan *Fixed Effect Model* (FEM) dalam mengestimasi data panel. Dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:

1. Jika nilai probabilitas untuk *cross section* $F >$ nilai signifikan 0,05 maka H_0 diterima, sehingga model yang paling tepat digunakan adalah *Common Effect Model* (CEM).
2. Jika nilai probabilitas untuk *cross section* $F <$ nilai signifikan 0,05 maka H_0 ditolak, sehingga model yang paling tepat digunakan adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

Hipotesis yang digunakan adalah:

H_0 : tidak terdapat perbedaan efek individu (CEM)

H_1 : Terdapat perbedaan efek individu (FEM)

3.4.3.2 Uji Hausman

Uji *hausman* adalah pengujian yang digunakan untuk memilih pendekatan terbaik antara model pendekatan *Random Effect Model* (REM) dengan *Fixed Effect Model* (FEM) dalam mengestimasi data panel. Dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:

1. Jika nilai probabilitas untuk *cross section random* $>$ nilai signifikan 0,05 maka H_0 diterima, sehingga model yang paling tepat digunakan adalah *Random Effect Model* (REM).
2. Jika nilai probabilitas untuk *cross section random* $<$ nilai signifikan 0,05 maka H_0 ditolak, sehingga model yang paling tepat digunakan adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

Hipotesis yang digunakan adalah:

H_0 : Tidak terdapat korelasi antara eror individu dengan variabel bebas (REM)

H_1 : Terdapat korelasi antara eror individu dengan variabel bebas (FEM)

3.4.3.3 Uji Lagrange Multiplier (LM)

Uji *lagrange multiplier* adalah pengujian yang digunakan untuk memilih pendekatan terbaik antara model pendekatan *Common Effect Model* (CEM) dengan *Random Effect Model* (REM) dalam mengestimasi data panel. *Random Effect Model* dikembangkan oleh *Breusch-Pagan* yang digunakan untuk menguji signifikansi yang didasarkan pada nilai residual dari metode OLS. Dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:

1. Jika nilai *cross section Breusch-Pagan* $>$ nilai signifikan 0,05 maka H_0 diterima, sehingga model yang paling tepat digunakan adalah *Common Effect Model* (CEM).
2. Jika nilai *cross section Breusch-Pagan* $<$ nilai signifikan 0,05 maka H_0 ditolak, sehingga model yang paling tepat digunakan adalah *Random Effect Model* (REM).

Hipotesis yang digunakan adalah:

H_0 : Tidak terdapat hubungan variansi residual, maka model terbaik CEM

H_1 : Terdapat variansi hubungan residual, maka model terbaik REM

3.4.4 Uji Asumsi Klasik

Menurut (Gujarati & Porter, 2015), *Common Effect Model* (CEM) dan *Fixed Effect Model* (FEM) menggunakan pendekatan *ordinary least Square* (OLS) sehingga diperlukan uji asumsi klasik. Sedangkan *Random Effect Model* (REM) menggunakan pendekatan *Generalized Least Square* (GLS) yang memiliki keunggulan dalam memperoleh estimasi yang tidak bias, konsisten, dan varians yang minimal sehingga menghasilkan model penduga yang lebih baik, maka tidak perlu dilakukan uji asumsi klasik (Hijrawati dkk., 2022; S. A. Putri dkk., 2025).

3.4.4.1 Uji Normalitas

Uji normalitas adalah suatu metode yang digunakan untuk menentukan apakah suatu data pada variable bebas dan variable terkait dalam persamaan regresi memiliki distribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini model yang digunakan untuk mendeteksi uji normalitas ialah dengan uji *jarque-bera* dengan dasar pengambilan keputusan:

1. Jika nilai probability jarque-bera $> 0,05$, maka data terdistribusi normal
2. Jika nilai probabilitas jarque-bera $\leq 0,05$, maka data tidak terdistribusi normal

3.4.4.2 Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi terdapat hubungan antar variable bebas (independen). Jika terdapat variable independent yang saling berkorelasi, maka variable-variable ini tidak ortogonal atau nilai korelasi antar variable independen adalah nol. Untuk menentukan apakah terjadi multikolonieritas pada penelitian ini didasarkan pada kriteria berikut:

1. Jika nilai tolerance $VIF < 10$, maka tidak terjadi multikolinearitas
2. Jika nilai tolerance $VIF > 10$, maka terjadi multikolinearitas

3.4.4.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan dalam model regresi linear antara residu dari periode t dan residu dari periode t-1, atau data yang dipengaruhi oleh data sebelumnya. Salah satu cara untuk mendetectsi adanya autokorelasi adalah dengan Uji Durbin-Watson (DW test). Pengambilan Keputusan ada tidaknya autokorelasi adalah dengan kriteria:

1. Jika nilai $DW < d_L$, maka terjadi autokorelasi positif.
2. Jika nilai $DW > (4d_L)$, maka terjadi autokorelasi negatif.
3. Jika nilai DW berada diantara d_L dan $(4-d_U)$, maka tidak terjadi autokorelasi.

3.4.4.4 Uji Heterokedasitas

Uji heterokedasitas merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika variance residual satu pengamatan tetap, maka disebut homokedasitas, tetapi jika berbeda maka disebut heteroskedasitas. Model regresi yang baik adalah terjadinya homokedasitas dan tidak terjadinya heterokedasitas. Untuk menguji heterokedastisitas dapat menggunakan uji Breusch-pagan, uji glejser, uji white, dan grafik plot dengan ketentuan:

1. Jika nilai probabilitas $< 0,05$, maka model regresi terjadi heterokedasitas.
2. Jika nilai probabilitas $> 0,05$, maka model regresi tidak terjadi heterokedasitas.

3.4.3 Analisis Regresi Data Panel

Analisis regresi yang menggunakan data panel disebut dengan model regresi data panel. Menurut Gujarati & Porter (2015) regresi data panel adalah teknik regresi yang menggabungkan antara data *cross-sectional* dan data *time series* untuk menghasilkan estimasi yang lebih akurat dan efisien. Regresi data

panel lebih unggul dalam memberikan variabilitas, lebih sediki kolonieritas antar variable, dan lebih banyak derajat kebebasan. Sehingga pada penelitian ini menggunakan regresi data panel, dengan data *cross-sectional* 34 Provinsi di Indonesia dan data *time series* tahun 2020-2024. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka model analisis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \beta_5 X_{5it} + \epsilon_{it}$$

Di mana:

Y : Indeks Gini

β_0 : Konstanta (intercept)

$\beta_1 - \beta_5$: Koefisien Regresi

X_1 : Dana Bagi Hasil

X_2 : Dana Alokasi Umum

X_3 : Dana Alokasi Khusus Fisik

X_4 : Dana Alokasi Khusus Non Fisik Operasional Kesehatan

X_5 : Dana Alokasi Khusus Non Fisik Operasional Pendidikan

ϵ : Eror Term

i : Provinsi

t : Tahun (2020-2024)

3.5 Pengujian Hipotesis

3.5.1 Uji T-statistik

Uji T bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh untuk masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel independen (X_1 , X_2 , X_3 , X_4 , dan X_5) terdapat pengaruh yang signifikan secara individu terhadap variabel dependen (Y) dengan melihat hasil koefisien dalam perhitungan regresi. Dasar pengambilan keputusan untuk menentukan apakah variabel independen (X)

memiliki pengaruh terhadap variabel dependen (Y) atau tidak dengan cara sebagai berikut:

1. Jika nilai signifikansi $t > 0,05$ maka H_0 diterima artinya tidak terdapat pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai signifikansi $t < 0,05$ maka H_0 ditolak artinya terdapat pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen.

3.5.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi yaitu, koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi berada antara nilai 0 dan 1. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kelima jenis dana perimbangan yang diteliti, yaitu:

1. Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan DBH mampu menurunkan ketimpangan pendapatan antar daerah. Semakin besar penerimaan DBH yang dikelola dengan baik oleh daerah, semakin besar pula potensi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan layanan publik. Temuan ini konsisten dengan teori federalisme fiskal serta tujuan desentralisasi fiskal yang mendorong keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
2. Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Artinya, peningkatan alokasi DAU berkontribusi terhadap pemerataan keuangan daerah dan penurunan kesenjangan ekonomi antar wilayah. Temuan ini menegaskan bahwa DAU berperan penting dalam mendukung kapasitas fiskal daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih merata, sehingga mendukung tercapainya tujuan pemerataan ekonomi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
3. Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Meskipun secara teoritis DAK Fisik

diharapkan dapat mengurangi kesenjangan melalui pembangunan infrastruktur dasar, namun dalam praktiknya efektivitasnya masih rendah akibat rendahnya realisasi penyerapan anggaran, lemahnya perencanaan, serta keterlambatan pelaksanaan proyek di daerah. Kondisi ini menyebabkan DAK Fisik belum mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pemerataan ekonomi antar daerah.

4. Dana Bantuan Operasional Kesehatan (DBOK) berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun kebijakan DBOK memiliki arah yang benar dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan, implementasinya masih menghadapi kendala administratif, rendahnya koordinasi, dan kurangnya transparansi di tingkat daerah. Akibatnya, manfaat DBOK belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah, sehingga belum efektif dalam menekan ketimpangan ekonomi.
5. Dana Bantuan Operasional Pendidikan (DBOP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Hasil ini menunjukkan peningkatan dana DBOP belum mampu menciptakan pemerataan pendidikan secara merata, bahkan cenderung memperlebar kesenjangan. Hal ini disebabkan oleh masih lemahnya pengawasan dan manajemen pengelolaan dana, serta adanya penyalahgunaan dana di beberapa daerah sebagaimana dilaporkan oleh BPK (2024). Akibatnya, peningkatan kualitas pendidikan hanya terjadi di wilayah yang memiliki kapasitas manajerial lebih baik, sementara daerah tertinggal tetap mengalami kesenjangan akses dan mutu pendidikan.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain:

1. Penelitian ini hanya menggunakan data sekunder yang bersumber dari realisasi anggaran pemerintah dengan pendekatan kuantitatif, sehingga penelitian ini belum dapat menggambarkan secara komprehensif terkait efektivitas penyaluran dan pemanfaatan dana perimbangan, dan

dampaknya langsung terhadap kondisi kesejahteraan dan ekonomi masyarakat.

2. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi, variable independent dalam penelitian ini hanya mampu menjelaskan 7,91% variasi ketimpangan pendapatan, yang disebabkan karena penelitian ini hanya berfokus pada variabel transfer dana pemerintah pusat, tanpa mempertimbangkan variable lain seperti indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran, dan tingkat investasi daerah yang juga memiliki peran penting dalam mempengaruhi tingkat ketimpangan pendapatan.

5.3 Saran

Berdasarkan temuan penelitian serta keterbatasan yang telah diidentifikasi, maka peneliti menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah pusat dan daerah, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penyaluran dan penggunaan dana perimbangan, agar lebih tepat sasaran dan berdasarkan kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut. Penguatan kemampuan Lembaga daerah dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaporan dana perlu ditingkatkan agar dana yang diterima benar-benar mendukung program pengentasan ketimpangan. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana perimbangan.
2. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan agar menggunakan variabel kontrol tambahan seperti IPM, tingkat investasi, belanja pemerintah daerah per sektor, serta tingkat kemiskinan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif. Perlu mempertimbangkan pendekatan campuran kuantitatif dan kualitatif, agar dapat menggali lebih dalam tentang tantangan implementasi dana perimbangan di daerah.

5.4 Implikasi Kebijakan

Berdasarkan temuan hasil penelitian, terdapat beberapa dana yang masih belum sepenuhnya mencapai tujuan awalnya. Oleh karena itu, diharapkan temuan ini menjadi sebuah bahan pertimbangan bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yaitu:

1. Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) telah menunjukkan bahwa kedua dana tersebut berhasil berperan sebagai instrumen pemerataan fiskal. Sehingga pemerintah perlu mempertahankan serta mengoptimalkan penyaluran DBH dan DAU dapat diarahkan pada pengembangan UMKM, peningkatan keterampilan tenaga kerja untuk memanfaatkan potensi daerahnya sehingga meningkatkan peluang ekonomi lokal.
2. Diharapkan kepada pemerintah agar dapat memberikan kebijakan yang lebih komprehensif dalam memperbaiki tata kelola keuangan daerahnya. Untuk DAK Fisik, pemerintah perlu memperbaiki lagi perencanaan dan pelaksanaan proyek, seperti mempercepat proses administrasi dan pelelangan proyek agar pembangunan tepat waktu dan anggaran bisa segera direalisasikan. Selain itu, pengawasan terhadap proyek juga harus diperkuat agar dana yang digunakan tidak disalahgunakan sehingga masyarakat dapat merasakan hasil pembangunan dan dapat meningkatkan pendapatan. selanjutnya untuk DBOK dan DBOP, diperlukan perbaikan tata kelola dengan meningkatkan transparansi, audit berkala, memperkuat koordinasi antar instansi, dan akuntabilitas. Pemerintah juga perlu memberikan pelatihan manajerial bagi pengelola dana agar penggunaan lebih tepat sasaran. Penyaluran dan realisasi anggaran juga perlu disederhanakan dengan sistem digital dan berbasis hasil kinerja supaya mempercepat penyerapan dan hasilnya dapat dirasakan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, A. N., Az-Zahra, A. R. R., Yusuf, A. N., Anggraeni, V., & Ramadhan, B. N. (2024). Pengaruh Korupsi Dana Bos (Bantuan Operasional Sekolah) Terhadap Fasilitas dan Kualitas Belajar Sekolah. *J-CEKI; Jurnal Cendikia Ilmiah*, 4(1), 546–553.
- Akbar, L. (2024). Analisis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah dalam Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru (Studi kasus Penggunaan Anggaran di SMP Negeri 36 Kota Bandung). *Antaranews.com*.
- Amalia, A. F. A. N., & Haryanto. (2019). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2017. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8.
- Andrianus, F. , & Said, M. (2006). Analisis sektor unggulan, ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi (Studi kasus Sumatera Barat tahun 1987-2002). *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 8(1), 9–17.
- Antara. (2022). Kemenkeu minta peningkatan penyerapan DAK Fisik di NTT. *ANTARA Kantor Berita Indonesia*. <https://www.antaranews.com/berita/3226741/kemenkeu-minta-peningkatan-penyerapan-dak-fisik-di-ntt>?
- Antara. (2023). Kemenkeu: Serapan DAK Fisik di Bengkulu mencapai Rp.215,78 miliar. *ANTARA Kantor Berita Indonesia*. <https://www.antaranews.com/berita/3680499/kemenkeu-serapan-dak-fisik-di-bengkulu-mencapai-rp21578-miliar>?
- Arbianti, S., & Suchaina. (2025). Peran Pendidikan dan Kesehatan dalam Mengurangi Ketimpangan dan Kemiskinan di Indonesia: Pendekatan Human Capital. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 15(1), 54–64. <https://doi.org/10.35448/jequ>
- Arshed, N., Anwar, A., Hassan, M. S., & Bukhari, S. (2019). Education stock and its implication for income inequality: The case of Asian economies. *Review of Development Economics*, 23(2), 1050–1066. <https://doi.org/10.1111/rode.12585>
- Awaludin, M. G., & Wibowo, P. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus Fisik, dan Dana Desa Terhadap Kemiskinan dan PDRB Daerah Tertinggal. *Jurnalku*, 3(4), 445–469.

- Azizi, M. (2018). Dampak Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Ketimpangan Produk Domestik Regional Bruto Di Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2005-2014. *Jurnal Kritis*, 2(1), 1–32.
- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kalimantan Tengah. (2024). *Penyalahgunaan Dana BOS, Bukti Pengawasan Disdik Lemah*. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Berita Resmi statistik Indonesia*. Badan Pusat Statistik .
- Bakar, A., & Rahmawan, R. (2021). Analisis Pengaruh Dana Bantuan Pembangunan dalam Rangka Mengurangi Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Jawa Barat. *LITERATUS*, 3(1), 147–151. <https://doi.org/10.37010/lit.v3i1.334>
- Chotia, V. (2017). An empirical investigation of the link between infrastructure development and poverty reduction: The case of India. *International Journal of Social Economics*, 44(12), 1906–1918.
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2020). *Daya Serap Belanja DAK Fisik Masih Rendah, Rp.243,83 Miliar Berpotensi Bakal Hangus*. Direktorat Jenderal Perbendaharaan, KPPN Negara Sorong. <https://djpdb.kemenkeu.go.id/kppn/sorong/id/data-publikasi/berita-terbaru/2853-daya-serap-belanja-dak-fisik-masih-rendah%2C-rp243%2C83-miliar-berpotensi-bakal-hangus.html?>
- Fadila, Y. B., & Idris. (2025). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengangguran, dan Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Sumatera Barat. *Media Riset Ekonomi Pembangunan (MedREP)*, 2(3), 738–747. <https://medrep.ppj.unp.ac.id/index.php/MedREP/login>
- Furceri, D., Loungani, P., Ostry, J. D., & Pizzuto, P. (2021). *The Rise in Inequality after Pandemics: Can Fiscal Support Play a Mitigating Role?*, WP/21/120, April 2021.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2015). *Dasar-dasar Ekonometrika Buku 2, Edisi 5*.
- Hanggraini, M., Agustar, A., & Jafrinur. (2023). Pemanfaatan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Implikasinya Terhadap Pelayanan Pada Puskesmas Rawat Inap Di Kbupaten Lima Puluh Kota. *Jurnal Niara*, 15(3), 551–560.
- Hijrawati, Wibawa, G., Yahya, I., Baharuddin, Rahman, G., & Agusrawati. (2022). Analisis regresi data panel pada faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan Sulawesi Tenggara tahun 2017-2020. *Jurnal matematika, Komputasi, dan Statistika*, 2(3).
- Kaloko, N., Sihombing, N., Lubis, S. A., & Tanjung, T. P. R. (2025). Peran Strategis Pendidikan dan Kesehatan dalam Pembangunan Ekonomi: Membangun Human Capital untuk Masa Depan. *PPIMAN Pusat Publikasi Ilmu Manajemen*, 3(1), 291–298. <https://doi.org/10.59603/ppiman.v3i1.707>
- Kenyon, D. A. (2018). Fiscal Federalism. *Center for the Study of Federalism*.

- Khuzaimah, S., Pramudho, K., & Zaharudin. (2025). Evaluasi Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. *Prepotif; Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 9(2).
- Kosmaryati, Handayani, C. A., Isfahani, R. N., & Widodo, E. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kriminalitas di Indonesia Tahun 2011-2016 dengan Regresi Data Panel. *Indonesian Journal of Applied Statistics*, 2(1).
- Kothari C.R. (2004). *C.R. Kothari - Research Methodology_ Methods and Techniques- New Age Publications (Academic)* (1 (Second Edition). New Age International (P) Limited, Publishers.
- Kuncoro, M. (2010). *Ekonomika Pembangunan: Masalah Kebijakan, dan Politik*. Erlangga.
- Maulina, A., Alkamal, M., & Fahira, N. S. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research*, 5(2), 390. <https://doi.org/10.52362/jisamar.v5i2.373>
- Muda, I., & Ridha, H. (2018). Effect of Revenue and General Allocation Fund of Capital Expenditures in the Economic Growth as Moderator Variable. Case of Indonesia. *Academic Journal of Economic Studies*, 4(1), 29–39. www.sumut.bps.go.id.
- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1984). *Public Finance in Theory and Practice* (4th edition). McGraw Hill.
- Nurani, E., & Solihin, A. (2025). Pengaruh Dana Bantuan Operasional Kesehatan dan Persentase Penduduk Miskin Terhadap Angka Mordibitas Kabupaten/Kota Di Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah MEA (manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, 9(1).
- Oates, W. E. (1972). Fiscal Desentralization and Economic Development. *National Tax Journal*, 237–243.
- PASPI. (2023). Kebijakan Dana Bagi Hasil Sawit, Dukungan Fiskal dari Industri sawit, dan Kontribusi Sawit dalam Ekonomi Daerah. *Artikel Diseminasi & Policy Brief*, 7.
- Periansya, Dewata, E., Sari, Y., & Nouvanti, F. (2021). The Effect of Locally Generated Revenue as an Intervening Variable on the Financial Performance of the Regional Government of South Sumatra Province. *Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies*, 7(4), 80–98. <https://doi.org/10.32602/jafas.2021.034>
- Purba, S., & Simandjorong, B. (2024). Pengaruh Dana Perimbangan Dalam Mengurangi Ketimpangan Pendapatan Dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Di Sumatera Utara. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 9(2), 141–155. <https://doi.org/10.33105/itrev.v9i2.887>
- Purwowidhu, C. (2023, Februari). *Benahi Ketimpangan, Begini Redesain Dana Bagi Hasil*. Media Keuangan-Kementerian Keuangan.

- Putri, N. P. V. S., & Natha, I. K. S. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 4(1), 41–49.
- Putri, S. A., Widiarti, & Nurvazly, D. E. (2025). Kajian model regresi data panel pada data indeks pembangunan manusia Provinsi DKI Jakarta tahun 2019-2023. *Math Unesa Jurnal Ilmiah Matematika*, 13(1).
- Qomariyah, N., & Priyarsono, D. (2016). *Dampak Transfer Fiskal Dan Belanja Modal Pemerintah Daerah Terhadap Perekonomian Sektoral, Ketimpangan Dan Kemiskinan Di Indonesia (Impacts Transfer Fund and Regional Governments Spending for Capital on Economic Growth, Inequality and Poverty in Indonesia)* (Vol. 5, Nomor 2).
- Rahma, G. A. (2024). Pengaruh Kebijakan Fiskal terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia: Analisis Regresi Kuantil. *Parahyangan Economic Development Review (PEDR)*, 3(2), 108–117.
- Ridho, M. A. M., & Wijayanti, D. (2022). Analisis pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil pajak, dan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Keuangan*, 71–81. <https://doi.org/10.20885/jkek.vol1.iss1.art7>
- Rindiani, S., Ruslan, F., & Sofyan, S. (2025). Peran pengeluaran pemerintah fungsi pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial terhadap ketimpangan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 5(1), 33–44.
- Salsabila, N. A., Juliarto, H. K., Syawal, A. F., & Nohe, D. A. (2022). Analisis regresi data panel pada ketimpangan pendapatan daerah di Provinsi Kalimantan Timur. *Prosding Seminar Nasional Matematika, Statistika, dan Aplikasinya*, 2.
- Saputri, N. S., & Sri Muniarti. (2023). *Kajian dampak Bantuan iuran Program Jaminan Kesehatan Terhadap Masyarakat Miskin dan Tidak Mampu*. www.smeru.or.id.
- Sari, P., Silaban, M. J., Sianturi, A., Putri, J., & Sembiring, B. (2024). *Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan Masyarakat di Sumatera Utara*. 13.
- Sari, Y. P. (2025). Dapatkah Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil Menurunkan Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Al-Khitmah*, 7(1).
- Sari, Y., Soleh, A., & Wafiaziza, W. (2021). Analisis pengaruh pendidikan dan penduduk miskin terhadap ketimpangan pendapatan di provinsi Jambi. *Jurnal Development*, 9(2).
- Sekaran, U., & Wiley, J. (2003). *A Skill-Building Approach Fourth Edition Research Methods for Businnes* (Fourth Edition). John Wiley & Sons, Inc. <http://www.wiley.com/college>
- Septyantie, U. P., & Cahyadin, M. (2013). Hubungan Antara Realisasi Dana Bantuan Operasional Kesehatan Dengan Indikator Gizi KIA di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 02(4).

- Sihombing, R. S. T., Kartika, A. T., Sitompul, Y. S., & Yoseph Anugerah, A. R. (2024). Implementasi Desentralisasi Fiskal Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan Di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Informasi, Perpajakan, akuntansi, dan Keuangan Publik*, 19(1), 81–96. <https://doi.org/10.25105/jipak.v19i1.18658>
- Supriyanto, A., & Utomo, Y. P. (2024). Studi Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Sumatera, Jawa, dan Bali Selama Periode 2018-2022. *Menara Ekonomi*, 10(1).
- Todaro, M. P., & Smith, S. P. (2006). *Economic Development* (9 ed.). Erlangga.
- Wahyuni, A. Y., Juanda, B., & Purnamadewi, Y. L. (2021). Analisis Pengaruh Alokasi DAK Masing-Masing Bidang Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak. *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*, 9(1), 1–17. <https://doi.org/10.14710/jwl.9.1.1-17>
- Wirandana, P. A., & Khoirunurrofik, K. (2022). Educational inequality in Indonesia: are intergovernmental fiscal transfers effective in reducing the gap? *Educational Studies*. <https://doi.org/10.1080/03055698.2022.2103647>
- Yuliantoni, S., & Indra Arza, F. (2021). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Modal dengan Sisa Lebih Pembayaran Anggaran (SILPA) sebagai Variabel Pemoderasi pada Pemerintah Provinsi se-Indonesia Periode 2015-2019. Dalam *JEA Jurnal Eksplorasi Akuntansi* (Vol. 3, Nomor 1). Online. <http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea>